**Nama : Riski Ferdiansyah**

**Kelas : 3H**

**NIM : 2201025008**

JAWABAN UTS Pendidikan PKN di SD:

1. Awal mula sejarah Pancasila terjadi dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Maret 1945. BPUPKI didirikan sebagai upaya memenuhi janji Perdana Menteri Kyoso mengenai pemberian kemerdekaan kepada Indonesia. BPUPKI bertugas menyelidiki agenda penting selama pembentukan negara dan berdiskusi mengenai dasar negara Indonesia. Sidang pertama BPUPKI, yang berlangsung pada 29 Mei - 1 Juni 1945, menampilkan pidato dari tokoh pergerakan nasional seperti Prof. Mohammad Yamin, Prof. Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Sidang kedua BPUPKI, pada 10 Juli-16 Juli 1945, mencetuskan dasar negara yang disepakati, yaitu Pancasila, dan membentuk panitia kecil terkait. Meskipun dibentuk pada 1 Maret 1945, BPUPKI secara resmi diresmikan pada 29 April 1945 dan dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Badan ini terdiri dari 67 anggota, dengan 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang yang bertugas memantau jalannya rapat. Proses merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melibatkan usulan-usulan dari tokoh pergerakan nasional, seperti Lima Dasar oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 dan Panca Sila oleh Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945, yang kemudian dikenal sebagai "Lahirnya Pancasila." Pada 1 Juni 2016, Presiden Joko Widodo mengesahkan "Hari Lahir Pancasila" sebagai hari libur nasional dengan penandatanganan dekrit Presiden Nomor 24 Tahun 2016 (Yunianti & Dewi, 2021).
2. Undang- undang yang membahas pendidikan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Merupakan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan nasional di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi (Hakim, 2016).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memiliki makna bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari tingkat kebijakan dan manajemen hingga pada pelaksanaannya oleh guru, dengan berbagai tingkatan di tingkat makro, meso, dan mikro (Noor, 2018). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memiliki dampak dan relevansi yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pernyataan tersebut menyoroti aspek-aspek penting dalam pendidikan, yang mencakup tingkat kebijakan dan manajemen hingga pada pelaksanaannya oleh guru, serta melibatkan berbagai tingkatan di tingkat makro (tingkat kebijakan nasional), meso (tingkat regional atau institusional), dan mikro (tingkat individu atau kelas).

Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dianggap memiliki dampak luas dan merata di seluruh sistem pendidikan. Hal ini mencakup aspek kebijakan yang diatur oleh undang-undang tersebut, manajemen institusi pendidikan, dan peran serta guru dalam implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, penekanan pada tiga tingkatan, yaitu makro, meso, dan mikro, menunjukkan bahwa undang-undang tersebut mencakup berbagai aspek dari tingkat kebijakan nasional hingga implementasi konkret di tingkat kelas.

1. Reformasi 98, atau perubahan politik yang terjadi setelah mundurnya Presiden Soeharto pada tahun 1998, merupakan langkah yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak 1997 menjadi pemicu utama bagi kejatuhan rezim Orde Baru. Meskipun kondisi ekonomi yang memburuk adalah salah satu penyebab utama ketidakpuasan masyarakat, reformasi ini bukan hanya tentang aspek ekonomi, melainkan juga tentang aspirasi untuk reformasi politik dan demokratisasi.

Ketidakpuasan masyarakat yang meluas, terutama diungkapkan melalui demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa, menunjukkan bahwa tuntutan untuk perubahan tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga politik. Terlepas dari argumen bahwa krisis ekonomi merupakan pendorong utama, penting untuk menyadari bahwa tuntutan untuk perubahan tersebut juga mencakup desakan untuk pemulihan demokrasi, kebebasan berpendapat, dan partisipasi politik yang lebih luas. Setelah reformasi, banyak perubahan yang dilakukan mulai dari segi ekonomi sampai dengan pendidikan.

Era reformasi yang dimulai setelah runtuhnya Orde Baru memberikan harapan baru terhadap kondisi demokratis di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Salah satu pencapaian yang paling mencolok dari upaya reformasi pendidikan terlihat dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dikeluarkan pada tahun 2003 (Maghfuri, 2020).

Meskipun reformasi 98 membawa perubahan positif, seperti terwujudnya kebebasan berpendapat dan partisipasi politik yang lebih terbuka, beberapa tantangan dan ketidakpastian politik juga muncul. Namun, secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa reformasi 98 merupakan langkah yang tepat untuk membawa perubahan yang mendalam dalam arah demokratisasi dan reformasi di Indonesia, termasuk sektor pendidikan.

1. Warga negara merujuk pada seseorang atau individu yang tinggal dan menjadi bagian dari suatu masyarakat di suatu wilayah tertentu. Sebagai salah satu komponen pembentukan suatu negara, yaitu warganya, warga negara dapat didefinisikan dengan sederhana sebagai semua individu yang tinggal dan berkembang di dalam wilayah negara tersebut.

Warga negara memiliki fungsi, antara lain, mematuhi hukum, ikut serta dalam pertahanan negara, menghormati hak asasi manusia, patuh terhadap peraturan, menjaga persatuan, mentaati dasar negara, serta turut serta dalam proses pembangunan untuk memajukan bangsa.

Dalam konstitusional, bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban bagi setiap warga negara sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Umra, 2019).

1. Pemilu di Indonesia diadakan secara teratur dan dengan teliti, dengan alokasi dana yang signifikan untuk menggerakkan partisipasi pemilih dan melakukan penelitian pendapat. Sejak tahun 1955, Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu. Sejarah pelaksanaan pemilihan umum dan sistem perwakilan dapat dilacak sejak masa kolonial, termasuk pemilihan umum di tingkat daerah seperti Yogyakarta dan Minahasa (Sulawesi Selatan). Mulai dari era Soeharto, yang dikenal dengan rezim "Orde Baru," Pemilu dijalankan secara berkesinambungan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Meskipun seharusnya Pemilu berikutnya dijadwalkan pada tahun 2002, kondisi politik, sosial, dan krisis ekonomi yang berlangsung lama menyebabkan penundaan. Akhirnya, Pemilu diadakan pada tahun 1999 setelah runtuhnya dominasi rezim Soeharto pada tahun 1998. Pemilu ini diakui sebagai salah satu Pemilu paling demokratis dalam 30 tahun terakhir, menandai awal era demokratisasi yang lebih kuat di Indonesia. Pemilu kemudian dilanjutkan pada tahun 2004 dan 2009, memperkuat dasar demokrasi di negara ini (Widianingsih, 2017).

**Daftar Pustaka**

Hakim, L. (2016). Pemerataan Akses Pendidikan bagi Rakyat Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal EduTech*, *02*(01), 53–64.

Maghfuri, A. (2020). Analisis Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam pada Awal Orde Reformasi (1998-2004). *TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *08*(01), 14–26.

Noor, T. (2018). Rumusan Tujuan Pendidikan Nasional Pasal 3 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, *02*(01), 123–144.

Umra, S. (2019). Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme atau Militerisasi Warga Negara. *Lex Renaissance*, *04*(01), 164–178.

Widianingsih, Y. (2017). Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik. *Journal Signal*, *05*(02).

Yunianti, V., & Dewi, D. (2021). Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, *03*(01), 107–112.